

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan memberi penjelasan tentang pengaruh perilaku kepatuhan didalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan perpektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi (Rosalina, 2010). Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut kamus besar bahasa Indonesia, patuh yaitu suka menurut perintah, taat kepada perintah, atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, dan patuh pada ajaran dan peraturan .

Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang semakin besar dan berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa, maka kepala desa dan perangkat desa semakin dituntut memberikan hasil terbaik dalam menjalankan tugasnya. Dengan dibuatnya sistem yang baik dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa mampu mandiri dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

2. Teori Stewardship

Menurut teori stewardship, manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Teori stewardship dapat menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* selalu bertindak sesuai kepentingan pemilik dimana manajer akan bertindak untuk kepentingan bersama. Ketika kepentingan pemilik sumber daya dengan *steward* berbeda, *steward* akan berusaha menjalin kerjasama dengan pemiliki ketimbang untuk menentang kepentingan pemilik, karena bagi *steward* kepentingan bersama merupakan hal yang lebih baik karena usaha untuk mencapai tujuan organisasi adalah yang terpenting. Dapat dikatakan bahwa kepuasan pemilik adalah kesuksesan organisasi, namun demikian perlu diingat bahwa *steward* juga memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup (Raharjo, 2007).

Teori ini sejalan dengan hubungan antara pemerintah sebagai *steward* yang mengelola sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik, dimana pemerintah sebagai *steward* memiliki tugas memberikan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat. Tugas melayani masyarakat ini sejalan dengan keinginan bersama yaitu kepentingan masyarakat. Selain dengan memberikan pelayanan publik yang baik pemerintah daerah juga diwajibkan untuk membuat sebuah laporan keuangan yang jujur sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya (Putro, 2013).

3. Good Governance Government

Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui oleh dunia. Salah satu lembaga tersebut yaitu *United Nations Development Program (UNDP)* dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for sustainable human development*” (1997) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antar negara, sektor swasta, dan sosial (Dwiyanto, 2005). Menurut *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran, salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (Mardiasmo, 2009).

Tujuan *good governance* tercapai di suatu negara bila dilihat dari rakyatnya yang sejahtera dan makmur. Untuk mengimplementasikan *good governance* bukanlah perkara yang mudah, karena banyaknya kendala-kendala yang melanda suatu Negara untuk bisa mewujudkan tata pemerintahan yang baik diantaranya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh orang internal sendiri yang membuat suatu permainan yang dibuat untuk menguntungkan dan mementingkan kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu untuk tercapainya tujuan *good governance*, pemerintah maupun masyarakatnya sendiri harus bekerja sama untuk sadar dan menanamkan rasa peduli kepada negara agar terwujudnya

pemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi peraturan atau standar yang telah ditetapkan

Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik.

4. Teori Organisasi

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Robbin (1994) mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Hasibuan (2011) memberikan pengertian yaitu suatu sistem perserikatan formal, berstruktur,

dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

5. Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang diartikan sebagai desa adalah keseluruhan masyarakat yang memiliki batasan wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya desa sendiri. Berdasarkan upaya masyarakat yang diakui oleh pemerintahan di Indonesia. Undang-undang desa membuka kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengelola sendiri seluruh aset yang ada di desa. Undang-undang desa mendorong agar kerjasama antar desa agar ditingkatkan untuk memaksimalkan kemampuan sumber daya yang ada agar lebih besar. Contohnya pengembangan usaha bersama, kerjasama di pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, kegiatan pemberdayaan masyarakat, sampai dengan pengembangan kawasan pedesaan yang menggabungkan aset desa untuk mencapai kesejahteraan bersama. Undang-undang desa juga menekankan pentingnya peran lembaga permasyarakatan desa untuk

mengembangkan partisipasi semua masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam mengelola semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa serta menggunakan dana desa secara bersama-sama.

6. Sistem Informasi

Menurut Hall dalam Kadir (2014) sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Menurut Hutahaean (2014) sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang bersifat manajerial, mengoperasikan pengelolaan transaksi harian dan berisi strategi dari suatu organisasi serta menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak luar.

Menurut Ajie (1996) sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen (manusia, teknologi, komputer, prosedur kerja) yang saling berinteraksi secara sistematis dan terstruktur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya suatu organisasi/institusi. Dari definisi sistem informasi menurut para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan interaksi antara manusia, teknologi, komputer, prosedur kerja dalam pembuatan atau pengolahan data menjadi informasi untuk mencapai tujuan organisasi.

7. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem keuangan desa atau yang disebut Siskeudes merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ini adalah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, memudahkan membuat laporan tatakelola keuangan desa karena sebelum adanya aplikasi ini, pencatatan laporan keuangan desa masih menggunakan aplikasi *microsoft excel* atau dengan mencatat manual yang kurang efisien. Aplikasi Siskeudes memberi kemudahan dalam penggunaan aplikasi (*user friendly*) yaitu walaupun perangkat desa tersebut belum dibekali dengan ilmu dasar akuntansi tetap bisa menggunakannya dengan melalui pelatihan, didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi, dan menatausahakan seluruh sumber dana yang dikelola oleh desa. Pemerintah desa dalam menjalankan sistem informasi desa termasuk laporan keuangan desa yang bisa dilihat dan dipantau oleh siapa saja. Sistem ini juga berguna untuk memberikan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang ditemukan dan perkembangan penyelesaian masalah.

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database *Microsoft Acces* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan *database acces* ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan *database*

SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sml pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP.

Output dari aplikasi Siskeudes terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Dokumen Penatausahaan
- Bukti Penerimaan;
- Surat Setoran Pajak (SSP)
- Dan dokumen-dokumen lainnya
- Laporan-laporan:
 - a. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register, Rencana Anggaran Biaya).
 - b. Laporan Penganggaran (Peraturan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa per sumber dana).

8. Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan pada prinsipnya merupakan upaya membekali seseorang dengan pengetahuan dan keterampilan serta *attitude* sehingga seseorang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas atau aktivitas keorganisasian sehari-hari. Dengan demikian melalui pengetahuan dan keterampilan serta *attitude* yang diperoleh melalui pelatihan tersebut, seorang pegawai atau anggota organisasi dapat lebih percaya diri didalam menghadapi persoalan yang dihadapi dalam tugasnya. Melalui program pelatihan diharapkan seluruh potensi yang dimiliki dapat ditingkatkan sesuai dengan keinginan organisasi atau setidaknya mendekati apa yang diharapkan oleh organisasi. Pelatihan biasanya dilaksanakan pada saat para pekerja memiliki keahlian yang kurang atau pada saat suatu organisasi mengubah suatu sistem dan perlu belajar tentang keahlian baru.

Menurut Widodo (2015), pelatihan merupakan serangkaian proses seseorang dalam meningkatkan kompetensi, keahlian dan pengetahuan secara sistematis dan terorganisir sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan seorang pegawai melaksanakan pekerjaan yang ditugaskannya sesuai dengan standar.

Pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan dan membekali pengetahuan individu. Pendidikan diperoleh melalui pembelajaran secara terstruktur dan dalam waktu yang relatif lama.

Pendidikan dalam bidang tertentu (spesialisasi) latar belakang pendidikan akan meningkatkan pengetahuan pada bidang berkenaan.

9. Pendampingan Desa

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. Suharto (2005) menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sejak tahun 2015 desa-desa di Indonesia mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat yang jumlahnya cukup besar.

Pada tahun 2017 jumlah dana desa mencapai 800 juta per desa dan akan terus bertambah ditiap tahunnya. Sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, pemerintah mewajibkan kepada desa untuk mencatat seluruh proses keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes. Sebagai tugas utama pendamping desa adalah mendampingi desa salah satunya adalah dalam hal penganggaran, termasuk mendampingi penginputan Siskeudes (Made Deva, 2017)

Karena keterbatasan SDM perangkat desa, desa memerlukan pendampingan yang intens agar para perangkat menguasai dengan benar aplikasi Siskeudes. Selain keterbatasan SDM perangkat desa, keterbatasan jumlah tenaga pendamping desa juga menjadi salah satu masalah pendampingan berjalan kurang merata.

10. Sarana Prasarana

Menurut Moenir (1992) sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Moenir juga membagi sarana dan prasarana menjadi 3 yaitu:

1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya.
2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkitkan dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.
3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.

Menurut pengertian yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah maka sarana prasarana yaitu:

1. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.
2. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.

Setiap sarana dan prasarana memiliki fungsi yang berbeda-beda, sesuai dengan lingkup dan penggunaannya. Meskipun berbeda, sarana dan prasarana mempunyai tujuan yang sama, yakni mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Dibawah ini adalah fungsi utama sarana dan prasarana, yaitu sebagai berikut.

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin.
4. Lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna
5. Ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.

7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

11. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam segala hal, begitu pula di bidang akuntansi pemerintah daerah. Sumber daya manusia merupakan subjek yang menentukan akan dibawa kemanakah suatu organisasi karena pihak yang akan menjalankan dan membuat segala macam standar serta aturan adalah sumber daya manusia tersebut. Baik atau buruknya organisasi dapat dikatakan tergantung pada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia adalah aset yang dimiliki organisasi yang dapat dikembangkan dan dilatih agar dapat membawa organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Saat ini sumber daya manusia bukan lagi sebagai *human resource* saja, namun lebih dari itu bahwa sumber daya manusia merupakan *human capital*. Dimana sumber daya manusia tidak lagi diibaratkan menjadi sebuah aset yang hanya dapat 20 dimanfaatkan namun sumber daya manusia merupakan modal yang dapat dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar memiliki kompetensi tertentu.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan segala bentuk keahlian, pengetahuan, dan pemahaman yang dimiliki oleh seorang individu.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pelatihan dan Pendidikan Terhadap Efektivitas Penggunaan Siskeudes

Pelatihan dapat membantu seseorang dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna meningkatkan keahliannya sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan adalah penyelenggaraan proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan sasaran.

Dalam teori *stewardship* yaitu pemerintah sebagai *steward* memiliki tugas memberikan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat serta membuat sebuah laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel. Hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan adalah dengan melalui pemahaman diperoleh dari pelatihan dan pendidikan. Adanya pelatihan dan pendidikan tersebut, perangkat desa dapat memahami strategi perencanaan realisasi anggaran, sehingga proses aplikasi di lapangan mudah mencapai target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hubungan pelatihan dan pendidikan terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes mengacu pada hasil dari penelitian Andi Rasma dkk (2016)

menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai bagian humas dan protokol sekretariat daerah artinya peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai akan diikuti dengan peningkatan kinerja pegawai, begitupun sebaliknya penurunan pendidikan dan pelatihan pegawai akan diikuti dengan menurunnya kinerja pegawai di bagian umum sekretariat daerah Kabupaten Soppeng.

Adapun penelitian dari Made Yeni (2018) yang memperoleh hasil bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Artinya jika pendidikan dan pelatihan tinggi maka efektivitas penerapan Siskeudes dan kualitas laporan keuangan dana desa akan tinggi.

H₁: *Pelatihan dan Pendidikan berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes*

2. Pendampingan Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Siskeudes

Kementerian Desa, dan Transmigrasi memandang perlu untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan tenaga pendamping profesional. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang semakin besar dan berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa, maka dari itu peran pendamping desa dituntut untuk membantu pelaksanaan program penyaluran dan pemanfaatan dana desa sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengingat Siskeudes merupakan aplikasi yang baru bagi desa maka

peran pendamping desa sangat penting ketika nantinya terjadi suatu kendala yang dialami pemakai sistem dalam pengoperasian Siskeudes sehingga hal tersebut sejalan dengan tujuan adanya pendamping desa yaitu meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Hubungan peran pendamping desa dengan efektivitas penggunaan Siskeudes mengacu juga pada penelitian Palevi (2017) yang menunjukkan hasil bahwa peran pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Artinya jika peran pendamping desa tinggi maka keberhasilan pengelolaan dana desa juga tinggi. Berbeda dengan penelitian Maria Christina (2015) Kinerja pendamping lokal desa berpengaruh negatif terhadap peningkatan pembangunan desa dikarenakan kurangnya jumlah pendamping desa dan intensitas mendampingi perangkat desa.

H₂: *Pendampingan berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes*

3. Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Penggunaan Siskeudes

Pemberian fasilitas yang lengkap juga dijadikan salah satu pendorong untuk bekerja. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Salah satu pendorong untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dengan fasilitas atau sarana prasarana kerja yang lengkap untuk menunjang kinerja pegawai. Suatu kantor harus mempunyai berbagai macam kelengkapan fasilitas

kerja seperti Gedung kantor, komputer, meja, kursi lemari dan fasilitas pendukung lainnya seperti kendaraan dinas. Fasilitas kerja merupakan sebuah bentuk pelayanan terhadap karyawan didalam menunjang kinerja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati dan Suryani (2014) diperoleh bahwa fasilitas kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Wonobojo Kabupaten Tumanggung. Penelitian dai Yeltsin Aprioke dkk (2017) pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Kantor Dinas Pendidikan Minahasa Tenggara. Pemberian fasilitas yang lengkap juga dijadikan salah satu pendorong untuk bekerja.

H₃: Sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes

4. Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Penggunaan Siskeudes

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Arfianti, 2011).

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia, maka semakin baik pula keterandalan pelaporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah. Hubungan kualitas sumber daya manusia dengan efektivitas penggunaan Siskeudes mengacu pada penelitian Sembiring (2013), yang menghasilkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan.

Penelitian yang dilakukan Caecilia dan Marthen (2014) yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya jika kualitas sumber daya manusia tinggi maka nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah juga tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis :

H₄: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes

5. Pelatihan dan Pendidikan Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor pendorong peningkatan kemampuan kerja karyawan dapat diperoleh dengan melakukan pelatihan kerja yang terprogram. Adanya program pelatihan dapat sesuai dengan program kerja yang akan dikembangkan. Organisasi dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan

potensi yang ada. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dibutuhkan pelatihan dan pendidikan yang memadai.

Pelatihan harus mengandung dua faktor kunci sebagai penentu keberhasilannya agar suatu program pelatihan efektif. Dua faktor kunci tersebut adalah memilih orang yang tepat untuk dididik dan dilatih dan menentukan tujuan program yang tepat.

Hasil penelitian dari Ekarendyka (2013) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa program pelatihan dikatakan efektif apabila program tersebut mampu menghasilkan perubahan sesuai yang dikehendaki organisasi, terutama perubahan dalam kemampuan karyawan. Hasil penelitian dari Made Deva (2017) juga menunjukkan hasil positif yaitu pelatihan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.

H₅: Pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia

6. Pendampingan Desa Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan merupakan salah satu langkah strategis untuk mengikuti perkembangan dalam dunia kerja dan menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan global. Sumber daya manusia yang berkualitas akan memberi kontribusi positif bagi kinerja organisasi atau perusahaan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan sumber daya

manusia dari organisasi atau perusahaan adalah dengan kegiatan pendampingan.

Pendampingan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pendamping, yaitu orang yang lebih berpengalaman atau ahli, dan *mentee* sebagai individu yang mendapat pendampingan. Adanya kegiatan pendampingan dapat dengan efektif dan efisien mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif.

Hubungan pendampingan desa dengan kualitas sumber daya manusia mengacu pada penelitian Nikodemus (2015) yaitu peran pendamping berpengaruh positif dalam upaya kualitas sumber daya manusia. Pendampingan dengan berbagai modelnya dapat digunakan secara efektif untuk pengembangan sumber daya manusia agar mendukung organisasi untuk lebih kompetitif menghadapi kemajuan dan tuntutan globalisasi.

H₆: Pendampingan desa berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia

7. Pelatihan dan Pendidikan Terhadap Efektivitas Penggunaan Siskeudes Melalui Kualitas Sumber Daya Manusia

Tata kelola pemerintahan desa yang baik bisa diperoleh dari proses pertanggung jawaban dan penyusunan APBDes, maka dari itu sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan dan tidak lepas dari pemahaman yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan. Orang yang berpendidikan akan lebih rasional dalam berpikir dan bertindak, serta memahami tugas dan tanggung jawab yang dibebankan dengan baik. Apabila

sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang diisyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas yang diberikan.

Menurut hasil penelitian dari Sasha (2017) Tingkat pendidikan, kualitas pelatihan dan pengalaman kerja berpengaruh secara Bersama-sama terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur desa, semakin baik kualitas pelatihan dan semakin lama masa/pengalaman kerja maka akan semakin meningkatkan pemahaman laporan keuangan desa.

H₇: Pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes melalui kualitas sumber daya manusia

8. Pendampingan Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Siskeudes Melalui Kualitas Sumber Daya Manusia

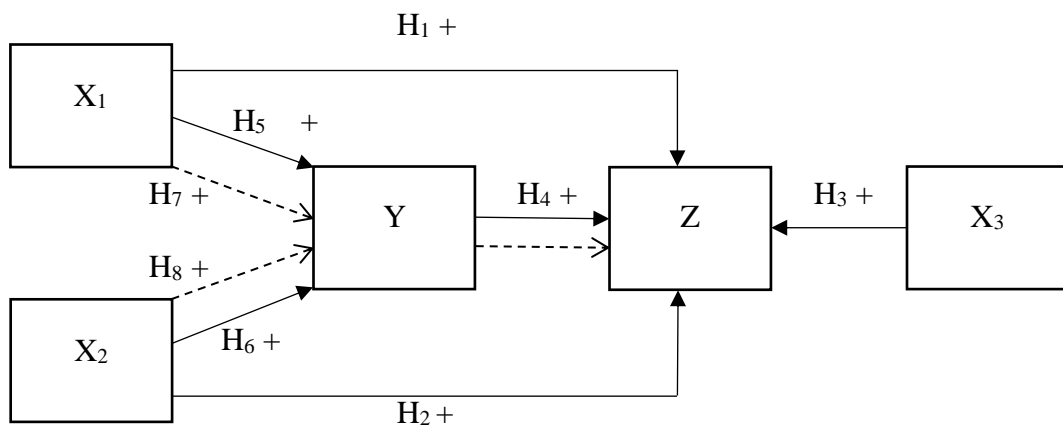
Suharto (2005) menguraikan bahwa pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia. Dengan adanya pendamping desa, maka desa merasa sangat terbantu apabila terjadi masalah terhadap penggunaan Siskeudes. Oleh karena itu peran aktif dari pendamping desa sangat diperlukan untuk membantu perangkat desa dalam mensukseskan implementasi Siskeudes pada setiap desa.

Hasil dari penelitian Made Deva dkk (2017) pendampingan desa berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes. Untuk

menunjang efektivitas penggunaan Siskeudes, peran pendamping desa sangat penting untuk membantu pemerintah desa dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes dengan baik.

H₈: Pendampingan desa berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes melalui kualitas sumber daya manusia

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

Keterangan:

- X₁ = Pelatihan dan Pendidikan
- X₂ = Pendampingan Desa
- X₃ = Sarana Prasarana
- Y = Kualitas Sumber Daya Manusia
- Z = Efektivitas Penggunaan Siskeudes